

ROADMAP PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI *STRATEGIC OF ASSET MANAGEMENT* DALAM PEDOMAN KEBIJAKAN ASET DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**Sri Wahyuni^{1*}, Firda Diartika², Catur Budi Nugraha³, Firsty R.A. Lubis⁴**^{1*} Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM), Yogyakarta.² Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.³ Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM), Yogyakarta.⁴ Ekonomi Pembangunan, FEB, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Email: *yiyieid@gmail.com

ABSTRAK

Barang milik daerah (BMD) merupakan aset yang bernilai tinggi apabila dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan aset tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Pengelolaan BMD secara optimal harus didukung dengan adanya perencanaan pengelolaan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berupa peta jalan yang dapat dijadikan pedoman oleh berbagai pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah yang berkaitan secara langsung dengan pengelolaan BMD. Tujuan dari kajian ini adalah menyusun peta jalan (*roadmap*) pemanfaatan BMD beserta rencana kerja rinci pemanfaatan barang milik daerah tahunan selama lima (5) tahun. Di dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dan engumpulan data menggunakan metode survei primer melalui kuesioner. Analisis data menggunakan metode *pairwise comparison* atau AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Pada penelitian ini, metode AHP digunakan untuk memilih program prioritas yang dituangkan dalam *roadmap* pemanfaatan BMD selama 5 tahun ke depan (2020-2024). Berdasarkan hasil analisis, didapatkan kesimpulan berupa *roadmap* pemanfaatan BMD selama 5 tahun berisikan program prioritas dan agenda yang dirinci setiap tahunnya yaitu pada tahun ke-1 (2020) program prioritas dimulai dengan Inventarisasi BMD, tahun ke-2 (2021) dilakukan Penilaian Potensi Aset BMD, tahun ke-3 (2022) dilakukan Pembuatan Dokumen Rencana Pemanfaatan BMD, tahun ke-4 (2023) dilakukan Optimalisasi Pemanfaatan BMD, dan tahun ke-5 (2024) dilakukan Pengukuran Kinerja Pemanfaatan BMD. Saran untuk pemangku kepentingan yang berkaitan dengan urusan pemanfaatan BMD sebaiknya merujuk pada *roadmap* pemanfaatan BMD yang telah disusun.

Kata Kunci: barang milik daerah, pemanfaatan aset, *roadmap* aset.**1. PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Mardiasmo *et al.* (2012) menyatakan bahwa faktor-faktor yang memiliki pengaruh kepada belum maksimalnya pengelolaan aset di Indonesia adalah konsep manajemen aset, sumber daya manusia pengelola, dan periode waktu pelaksanaan manajemen aset yang belum optimal. Didalam manajemen aset, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan aset sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hariyanto dan Narsa (2018) mengatakan bahwa *asset management* adalah proses berkelanjutan yang memerlukan

komitmen semua pihak dalam dalam rangka memenuhi prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Yang diperlukan juga adalah reformasi secara komprehensif pada unsur-unsur yang terkait pengelola dan pengguna barang yaitu sumber daya manusia terutama para pejabat/petugas yang menangani pengelolaan barang. Menurut Pekei *et al.* (2014) pengelolaan aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset. Perjalanan untuk menciptakan manajemen aset yang modern memang masih memerlukan waktu yang panjang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan kajian *Roadmap* Pemanfaatan BMD sebagai pedoman pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY untuk 5 (lima) tahun kedepan (2019 - 2024).

Identifikasi Masalah

Didalam pengelolaan BMD secara optimal harus didukung dengan adanya perencanaan pengelolaan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berupa peta jalan yang dapat dijadikan pedoman oleh berbagai pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah yang berkaitan secara langsung dengan pengelolaan BMD. Peta jalan (roadmap) merupakan sebuah upaya dalam rangka mewujudkan proses perencanaan yang sesuai dengan prinsip *Strategic Asset Management (SAM)*. Graham *et al.* (2007) menyampaikan bahwa sebuah *roadmap* untuk menentukan prioritas keinginan dari kebutuhan suatu sistem merupakan suatu *Strategic Asset Management (SAM)*. Berdasarkan dari upaya tersebut dan kondisi eksisting dimana hingga saat ini belum terdapat peta jalan (*roadmap*) pemanfaatan/pengelolaan BMD secara berkala (tahunan) yang dapat menjadi pedoman spesifik pemanfaatan/pengelolaan BMD, maka kajian penelitian ini dilakukan.

Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah menyusun peta jalan (*roadmap*) pemanfaatan Barang Milik Daerah beserta rencana kerja rinci pemanfaatan barang milik daerah tahunan selama lima (5) tahun.

Dasar Teori

Roadmap

Peta Jalan atau *Roadmap* adalah sebuah peta jalan atau bisa juga acuan untuk mencapai sesuatu. Hadiyanti (2009) dan Mardiasmo *et al.* (2012) menyampaikan bahwa pelaksanaan manajemen asset negara di Indonesia dilaksanakan berdasarkan *road map* dengan mewujudkan *Strategic Asset Management (SAM)*. Dengan adanya *roadmap* ini, maka akan dapat ditentukan arah pengembangan pemanfaatan barang milik daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Roadmap Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan rencana yang sesuai dan dalam jangka panjang.

Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty dalam bukunya adalah metoda untuk menyelesaikan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

Prinsip dari AHP adalah sebagai berikut:

1. **Decomposition** yaitu membuat *hierarchy*. Ketika ada sebuah sistem yang kompleks, dapat dipecah menjadi sederhana.
2. **Comparative judgment** yaitu menentukan nilai kriteria dan alternatif

Beberapa kriteria dan alternatif sering ditunjukkan dengan matrik berpasangan. Menurut Saaty (1988) dapat menggunakan skala perbandingan sebagai ukuran seperti pada skala di bawah ini yang menyatakan intensitas kepentingan.

- 1 : sama pentingnya (*equal*)
- 3 : lebih sedikit penting (*slightly*)
- 5 : lebih kuat pentingnya (*strongly*)
- 7 : lebih penting sangat kuat (*very strong*)
- 9 : lebih penting dengan cara ekstrim (*extreme*) → Skala 2,4,6,8? Definisi operasional (dalam bentuk Tabel) seperti dalam buku Thomas L. Saaty.

1. *Synthesis of priority*, menentukan skala prioritas dari elemen kriteria. Hal ini sering kali dilihat sebagai bobot atau kontribusi terhadap tujuan pengambilan keputusan.
2. *Logical Consistency*

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah:

Jenis Data

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Tipe deskriptif dipilih karena sesuai dengan penelitian, sehingga nantinya dapat melihat gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan.

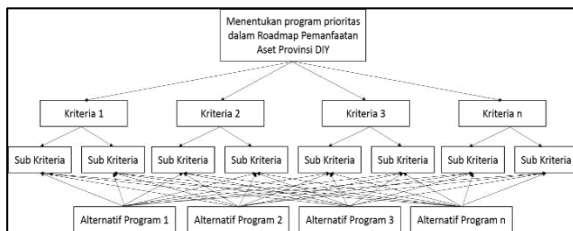
Sumber Data

Sumber dalam pengumpulan data dilakukan dengan survei primer melalui kuesioner. Responden yang dipilih menggunakan perwakilan seluruh SKPD Provinsi DIY yang

berkaitan secara langsung dengan urusan pemanfaatan asset atau Barang Milik Daerah Provinsi DIY.

Pendekatan

Pada penelitian ini, metode AHP digunakan untuk memilih program prioritas yang dituangkan dalam roadmap pemanfaatan BMD Provinsi DI Yogyakarta selama 5 tahun ke depan. Pemilihan program prioritas dilakukan dengan membandingkannya berdasarkan kriteria yang berasal dari kajian literatur dan peraturan perundangan terkait pemanfaatan aset/ barang milik daerah.



Gambar 1. Metode AHP dalam Pemilihan Program Prioritas

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dari gambar metode AHP tersebut, ditentukan usulan alternatif program kriteria untuk metode AHP tersebut, berikut adalah alternatif program dan usulan untuk metode AHP.

Tabel 1. Alternatif Program dalam Roadmap Pemanfaatan BMD

No	Alternatif Program	Dasar Usulan
1.	Inventarisasi Aset - Inventarisasi Fisik (Bentuk, Luas, Lokasi, Volume, Jenis, Alamat) - Inventarisasi Legalitas (Sertifikasi/Legalisasi Aset/Status Penguasaan)	Prinsip Umum Pengelolaan Aset pada <i>Australia Commonwealth Property Management Guidelines</i>
2.	Penilaian Potensi Aset - Analisis Biaya - Analisis Benefit - Analisis HBU - Analisis Payback Period - IRR	Prinsip Umum Pengelolaan Aset pada <i>Australia Commonwealth Property Management Guidelines</i>
3.	Pembuatan Dokumen Rencana Pemanfaatan Aset	- Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang

No	Alternatif Program	Dasar Usulan
	- Kajian Pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, Kerjasama Penggunaan atau pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur,) - Pemilihan Mitra Kerjasama	Pengelolaan BMD - Prinsip Umum Pengelolaan Aset pada <i>Australia Commonwealth Property Management Guidelines</i>
4.	Optimalisasi Pemanfaatan Aset	<i>Australia Commonwealth Property Management Guidelines</i>
5.	Pengukuran Kinerja Aset (Monitoring dan Evaluasi)	<i>Australia Commonwealth Property Management Guidelines</i>

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Tabel 2. Kriteria dalam Menilai Alternatif Program

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria	Dasar Usulan
1.	Transparansi	Program memerlukan keterbukaan	PP No 27 Tahun 2014 tentang
2.	Efisiensi	Program memerlukan sumber daya yang sedikit, namun menghasilkan output yang besar	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 3 terkait asas pengelolaan barang milik negara/daerah.
3.	Akuntabilitas	Program memerlukan pertanggungjawaban	
4.	Kepastian Hukum	Program memerlukan jaminan untuk dijalankan sesuai hukum/peraturan	
5.	Efektifitas	Program harus mencapai tujuan yang tepat dengan serangkaian alternatif cara pencapaian.	Prinsip Umum Pengelolaan Aset pada <i>Australia Commonwealth Property Management Guidelines</i>

6.	Kapasitas SDM	Program memerlukan SDM yang memiliki kapasitas khusus/tertentu berkaitan dengan pemanfaatan aset	Hadinata, Acep, dkk. 2012. Media DJKN Edisi 09 Tahun III/2012 : Roadmap Strategic Assets
7.	Penganggaran	Program perlu dianggarkan secara konsisten dan kontinyu	Managemen t oleh DJKN Depkeu
8.	Koordinasi	Program memerlukan koordinasi lintas pihak secara intensif	
9.	Sistem Aplikasi	Program memerlukan sebuah sistem aplikasi/teknologi	

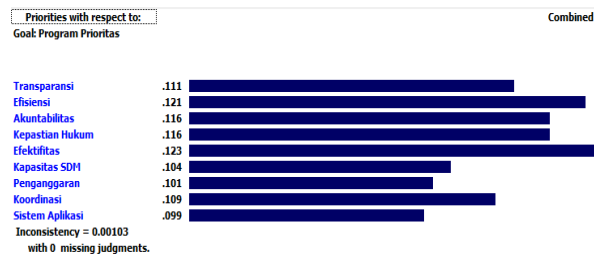
Sumber: Hasil Analisis, 2019

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *AHP* menggunakan kriteria dan alternatif yang akan mengeluarkan prioritas kriteria dan prioritas alternatif program yang terpilih berdasarkan prioritas kriteria. pengkajian diperkenankan mencantumkan subbab, pembuatan bab per bab didalam bab pembahasan disesuaikan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam menentukan Program Prioritas Roadmap Pemanfaatan BMD terdapat pada tabel 2. Sedangkan untuk pilihan alternatif program terpilih enam (6) alternatif-alternatif yang akan dinilai yang terdapat pada tabel 1.

Prioritas Kriteria

Saat sudah melalui proses pengolahan data menggunakan *software Expert Choice version 11*, tahap pertama yang dilakukan adalah menghitung bobot prioritas masing-masing kriteria dari penilaian yang diberikan oleh seluruh responden sebanyak 8 responden dalam menentukan Program Prioritas Roadmap Pemanfaatan BMD. Dan hasil pengolahan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* terhadap kriteria adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil AHP Kriteria Prioritas

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil expert choice pada Gambar di atas, diperoleh urutan bobot prioritas kriteria terhadap penentuan Program Prioritas Roadmap Pemanfaatan BMD. Terdapat 3 kriteria dengan bobot tertinggi yaitu kriteria keefektifan memiliki bobot tertinggi yaitu sebesar 0,123, kriteria efisiensi sebesar 0,121, dan kriteria ragam kegiatan akuntabilitas dan kriteria kepastian hukum sebesar 0,116. Yang memiliki kriteria bobot terendah adalah kriteria sistem aplikasi yaitu sebesar 0,099. Nilai *inconsistency rasio* pada kriteria tersebut adalah 0,00103 yang menunjukkan bahwa hasil dari AHP dapat diterima karena nilai *inconsistency rasio* kurang dari 0,1. Urutan bobot prioritas kriteria penentuan Program Prioritas Roadmap Pemanfaatan BMD dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. Urutan Bobot Prioritas

Urutan Prioritas	Kriteria	Bobot
1	Keefektifan	0,123
2	Efisiensi	0,121
3	Akuntabilitas	0,116
4	Kepastian Hukum	0,116
5	Transparansi	0,111
6	Koordinasi	0,109
7	Kapasitas SDM	0,104
8	Penganggaran	0,101
9	Sistem Aplikasi	0,099

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Prioritas Program Roadmap Pemanfaatan BMD

Tahap selanjutnya adalah menentukan prioritas Program dalam Roadmap Pemanfaatan BMD. Tahap ini juga dilakukan dengan menggunakan *software Expert Choice versi 11*. Gambar 3 adalah hasil pengolahan AHP untuk menentukan prioritas Program dalam Roadmap Pemanfaatan BMD.

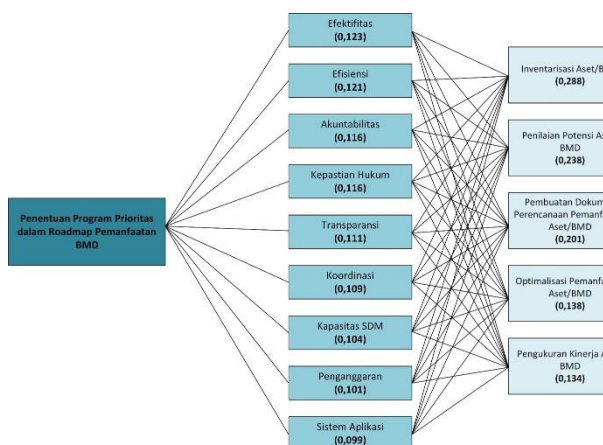


Gambar 3. Hasil AHP Program dalam Roadmap Pemanfaatan BMD
Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil *expert choice*, diperoleh bobot dari masing-masing alternatif program yang akan ditetapkan sebagai Program Prioritas pada Roadmap Pemanfaatan BMD. Alternatif program yang memiliki bobot tertinggi adalah Inventarisasi Aset/BMD sebesar 0,288, pada urutan kedua adalah Penilaian Potensi Aset/BMD yaitu sebesar 0,238, pada urutan ketiga adalah Pembuatan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Aset/BMD sebesar 0,201, selanjutnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset/BMD sebesar 0,138, dan urutan terakhir adalah Pengukuran Kinerja Aset/BMD sebesar 0,134. Nilai inconsistency ratio lokasi dalam pemilihan Program Prioritas Roadmap Pemanfaatan BMD yaitu sebesar 0,04 yang menunjukkan bahwa hasil AHP dapat diterima karena nilai inconsistency ratio kurang dari 0,1. Urutan bobot penentuan Program Prioritas Roadmap Pemanfaatan BMD yaitu:

1. Inventarisasi Aset/BMD
2. Penilaian Potensi Aset/BMD
3. Pembuatan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Aset/BMD
4. Optimalisasi Pemanfaatan Aset/BMD
5. Pengukuran Kinerja Aset/BMD

Selanjutnya hasil analisis AHP untuk menentukan Program Prioritas Roadmap Pemanfaatan BMD dapat digambarkan dalam hirarki sebagai berikut.

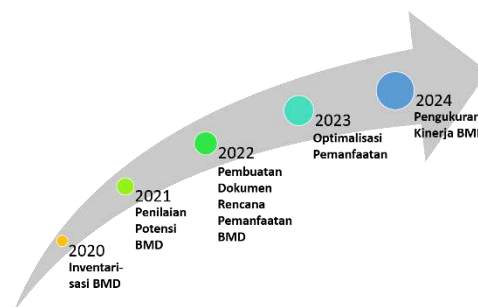


Gambar 4. Diagram Penentuan Program Prioritas Roadmap Pemanfaatan BMD
Sumber: Hasil Analisis, 2019

Hasil penentuan program prioritas di atas akan menjadi masukan bagi pengisian program dalam Roadmap Pemanfaatan BMD. Penentuan prioritas program akan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan, sistem penganggaran dan operasional pelaksanaan program. Program prioritas akan diturunkan lebih rinci menjadi beberapa kegiatan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun pelaksanaan Roadmap Pemanfaatan BMD Provinsi D.I. Yogyakarta.

Roadmap Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dihasilkan sebuah roadmap pemanfaatan barang milik daerah. Roadmap adalah sebuah peta jalan mengenai cara kerja pengelolaan barang milik daerah yang berisikan berbagai program prioritas dan agenda inovasi dalam rentang waktu 5 tahun. Berikut disampaikan roadmap untuk pemanfaatan barang milik daerah D.I Yogyakarta.



Gambar 5. Roadmap Pemanfaatan BMD
Sumber: Hasil Analisis, 2019

Pada gambar 5. dapat dilihat bahwa pada tahun ke-1 (2020) program prioritas dimulai dengan Inventarisasi BMD, tahun ke-2 (2021) dilakukan Penilaian Potensi Aset BMD, tahun ke-3 (2022) dilakukan Pembuatan Dokumen Rencana Pemanfaatan BMD, tahun ke-4 (2023) dilakukan Optimalisasi Pemanfaatan BMD, dan tahun ke-5 (2024) dilakukan Pengukuran Kinerja Pemanfaatan BMD.

Untuk lebih rinci apa saja program prioritas dan agenda yang harus dilakukan selama 5 tahun (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dijabarkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Program dan Agenda Roadmap Pemanfaatan BMD

PROGRAM PRIORITAS		AGENDA	
Tahun 2020 (Tahun Ke-1)			
Inventarisasi Aset/BMD	Penataan Sistem Informasi Aset/BMD	1	Pembuatan/Perbaharuan Sistem Informasi Manajemen Aset (dikelola oleh BPKA)
		2	Identifikasi Aset Potensial dan Strategis (tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, dll).
	Inventarisasi Fisik (Bentuk, Luas, Lokasi, Volume, Jenis, Alamat)	3	Input pada sistem informasi manajemen aset. <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk • Luas/Volume • Lokasi/Alamat • Jenis • Spesifikasi
	Inventarisasi Legalitas (Sertifikasi/Legalitas Aset/Status Penguasaan)	4	Input pada sistem informasi manajemen aset <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi • Status Penguasaan
Tahun 2021 (Tahun Ke-2)			
Penilaian Potensi Aset/BMD	Cost Benefit Analysis	1	Analisis Biaya dan Manfaat
		2	Analisis HBU
		3	Analisis Payback Period
		4	Analisis IRR
Tahun 2022 (Tahun Ke-3)			
Pembuatan Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Aset/BMD	Analisis Pemanfaatan	1	Analisis Potensi
		2	Melakukan analisis pemanfaatan: <ul style="list-style-type: none"> • Sewa • Pinjam pakai • Kerjasama Pemanfaatan • Bangun Guna Serah (BGS)

PROGRAM PRIORITAS		AGENDA	
			<ul style="list-style-type: none"> • Bangun Serah Guna (BSG) • Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
		3	Pemilihan Mitra Kerja
		4	Rencana Pemanfaatan dan Mekanisme Pemanfaatan Tiap Tahun
Tahun 2023 (Tahun ke-4)			
Optimalisasi Pemanfaatan Aset/BMD	Membangun kemitraan Aset/ BMD	1	Membangun kemitraan melalui pemanfaatan modal, sewa, dll
		2	Kolaborasi Pembangunan Daerah
		3	Penambahan Aset BMD melalui Public-Private Partnership (Perluasan Kemitraan BMD)
Tahun 2024 (Tahun Ke-5)			
Pengukuran Kinerja Aset/BMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur Kondisi dan Nilai Ekonomi Aset/ BMD 2. Kontribusi Aset/ BMD dalam Peningkatan PAD 3. Monitoring dan Evaluasi 	1	Pengukuran Kondisi Fisik Aset/BMD
		2	Pengukuran Kesesuaian Peruntukan Pemanfaatan BMD
		3	Pengukuran Nilai Ekonomi Aset tiap Tahun Pemanfaatan
		4	Implementasi proses bisnis pengelolaan BMD
		5	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian
		6	Evaluasi dan Perbaikan
		7	Melakukan review dokumen

PROGRAM PRIORITAS		AGENDA
		perencanaan pemanfaatan untuk 5 tahun berikutnya

Sumber: Hasil Analisis, 2019

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan hasil analisis pada bab sebelumnya, didapatkan kesimpulan berupa *roadmap* pemanfaatan BMD selama 5 tahun berisikan program prioritas dan agenda yang dirinci setiap tahunnya yaitu pada tahun ke-1 (2020) program prioritas dimulai dengan Inventarisasi BMD, tahun ke-2 (2021) dilakukan Penilaian Potensi Aset BMD, tahun ke-3 (2022) dilakukan Pembuatan Dokumen Rencana Pemanfaatan BMD, tahun ke-4 (2023) dilakukan Optimalisasi Pemanfaatan BMD, dan tahun ke-5 (2024) dilakukan Pengukuran Kinerja Pemanfaatan BMD. Hal tersebut sejalan dengan unsur pengelolaan aset yang baik menurut *Department of Treasury and Finance Government of Victoria* (2000) dimana meliputi perencanaan, perolehan, pemanfaatan, pemantauan dan pengelolaan kinerja (didalamnya juga menyangkut penghapusan). Unsur tersebut juga sesuai dengan pengelolaan aset oleh DJKN yang mengacu pada prinsip *Strategic Asset Management* (Hariyanto dan Narsa, 2018).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat sebelumnya, saran yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan BMD selama 5 tahun (2020-2024) sebaiknya merujuk pada *roadmap* pemanfaatan BMD yang telah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. "Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2019". BPS. Yogyakarta.
Badan Pusat Statistik. 2018. PDRB Perkapita Kabupaten/ Kota. BPS. Prov Yogyakarta.
Graham, A., Wessels. E., dan Bishop, S. (2007). *Strategic Asset Management. A roadmap for prioritising utility system's needs*.
Hadinata, Acep, dkk. (2012). *Media DJKN*

Edisi 09 Tahun III/2012 : Roadmap Strategic Assets Management. DJKN Depkeu. Jakarta.
Hariyanto. (2009). *Strategic Asset Management: Kontribusi Pengelolaan Aset Negara Dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal. In Era Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, Implementasi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Hariyanto, E. B. dan Narsa, I.M. (2018). *Strategic Assets Management: Fokus Pemanfaatan Aset Negara Dengan Pendekatan Resource Based View*. AKTSAR: Volume 1, No 1, Hal. 112-129, ISSN: 2622-5255.
Kasubdit KNL III, Direktorat Kekayaan Negara Lain-Lain. 2009. "Beberapa Prinsip Dasar Dan International Best Practices Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara Berupa Aset". Diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 19.30. Tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2309/Beberapa-Prinsip-Dasar-DanInternational-Best-Practices-Dalam-Pengelolaan-Kekayaan-Negara-Berupa-As.html>
Mardiasmo, D., Sampford, C., dan Barnes, P. (2012). *The Exemplification of Governance Principles within State Asset Management Laws and Policies: The Case of Indonesia*: Springer-Verlag London Limited.
Pekei, B., et al. (2014). The Effectiveness of Local Asset Management (A Study On The Government of Jayapura). *International Journal of Business and Management Invention*, Volume 3, Issue 3, Maret 2014, ISSN (Online): 2319-8028.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Saaty, Thomas L. 1993. "Multi Criteria Decision Making The Analytical Hierarchy Process Planning, Priority Setting, Ressource Allocation". Univerity of Pittsburg.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah

Saaty, TL., 1988. The Analytic Hierarchy
Process. Pittsburgh: University of
Pittsburgh.